

KEPENTINGAN NASIONAL AUSTRALIA DENGAN KIRIBATI DALAM KERJASAMA *MIGRATION WITH DIGNITY* TAHUN 2006-2014

Oleh Ersu Dwi Yulianda

20150510205

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email : ersa.dwi.2015@fisipol.umy.ac.id

ABSTRACT

This Research Title “Australia’s National Interest in Cooperation Migration with Dignity in 2006-2004”. Australia is a country with stable society and one of the oldest land masses in the world and also has been inhabited by humans for around 60,000 years. Along with the development of industry and growth of population, human activity has also increased which has a negative impact on the environment namely global warming or sea-level rise. Thus, there were many actions taken by several countries including Australia in handling in the issue. The evidence is the increase of global temperatures which caused the major changes in the natural system of the earth.

Moreover, for archipelago state like Kiribati, this means in the next 30 years Kiribati will declare not worthy of being worshiped, and even worse in the next 50-60 years Kiribati will sink completely. If the temperature increase, the possibility is Kiribati will be more worried. Facing the issue, Australia and Kiribati government took a policy called Migration with Dignity (Lagan, 2008). The aim of migration with dignity policy is to prepare the society of Kiribari to face the possibility of migration to other countries due to sea-level rising. Therefore, this study purpose to Explain Australia’s National Interest in Cooperation Migration with Dignity in 2006-2014. Qualitative methods were employed in this research. From this research, it can be concluded that there was an interest in both countries.

Keywords: *Australia – Kiribati, Migration With Dignity, Nasional Interest*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Kepentingan Nasional Australia Dalam Kerjasama *Migration with Dignity* Tahun 2006-2014”. Australia merupakan negara dengan masyarakat yang stabil serta menjadi salah satu massa daratan tertua di dunia dan telah berpenghuni manusia sekitar 60.000 tahun. Seiring dengan perkembangan industri dan penambahan penduduk, bertambah pula aktivitas manusia yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti *global warming* ataupun *sea-level rise*. Oleh karena nya banyak tindakan yang dilakukan oleh beberapa negara tak terkecuali Australia dalam menangani isu tersebut. Hal ini dibuktikan dalam Kenaikan temperatur global yang menyebabkan perubahan besar pada sistem alami bumi.

Terlebih lagi, bagi negara kepulauan kecil seperti Kiribati, hal ini berarti 30 tahun kedepan Kiribati akan dinyatakan tidak layak untuk dihuni lagi, dan bahkan bertambah buruk dalam 50-60 tahun negara ini akan tenggelam sepenuhnya. Apabila keadaan atas kenaikan temperature suhu ini maka kemungkinan besar keadaan Kiribati semakin mencemaskan. Menghadapi hal tersebut pemerintah Australia dan Kiribati mengambil kebijakan yang disebut dengan *Migration with Dignity* atau Migrasi yang bermartabat(Lagan, 2008). Kebijakan *Migration with Dignity* adalah kebijakan yang bertujuan untuk mempersiapkan warga Kiribati menghadapi kemungkinan migrasi ke negara lain akibat kenaikan permukaan air laut. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apa kepentingan nasional Australia dalam kerjasama *Migration with Dignity* tahun 2006-2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya kepentingan Australia di Kiribati bagi kepentingan kedua negara tersebut.

Kata Kunci: Australia – Kiribati, *Migration with Dignity*, Kepentingan Nasional.

PENDAHULUAN

Australia adalah negara dengan masyarakat yang stabil, berkebudayaan majemuk dan demokratis disertai dengan angkatan kerja yang terampil dan ekonomi yang kuat dan berdaya saing. Dengan penduduk lebih dari 21 juta, Australia adalah satu-satunya bangsa yang memerintah seluruh benua dan negara dengan wilayah daratan terluas ke-enam di dunia. Masyarakat multikultural Australia mencakup penduduk Asli dan pendatang dari sekitar 200 negara (Kedutaan Besar Australia., 2015).

Australia adalah salah satu massa daratan tertua di dunia dan telah berpenghuni manusia sekitar 60.000 tahun. Sebelum kehadiran pendatang Eropa, penduduk Aborijin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres mendiami sebagian besar wilayah benua. Seiring dengan perkembangan industri dan penambahan penduduk, semakin banyak aktivitas manusia yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mengancam keadaan bumi yang berujung pada *global warming* ataupun *sea-level rise*. Kondisi ini dialami oleh berbagai negara yang menjadikan industri sebagai kegiatan utama dalam meningkatkan GDP untuk kesejahteraanarganya.

Menanggapi isu kerusakan lingkungan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh beberapa negara dengan tujuan menindaklanjuti permasalahan lingkungan yang memberi dampak negatif terhadap ekosistem bumi, termasuk Australia. Program pencegahan, penanganan, dan pemeliharaan telah diluncurkan oleh Pemerintah Australia guna menjaga keberlangsungan ekosistem. Hal ini merupakan sebuah langkah menarik yang bisa diikuti oleh negara lainnya (Hayati S. , 2018).

Negara- negara kepulauan di kawasan pasifik selatan telah menarik perhatian dunia internasional beberapa tahun belakangan. Hal ini terkait dengan pemanasan global yang memicu kenaikan permukaan dan mengancam keberadaan negara- negara ini. Kenaikan permukaan air laut dinyatakan akan meningkat sebanyak 1-3 mm pada abad ini. Kenaikan temperatur global menyebabkan perubahan besar pada sistem alami bumi.

Tingkat pemanasan rata-rata selama lima puluh tahun terakhir hampir dua kali lipat, kenaikan temperatur rata-rata naik sebesar $0,74^{\circ}\text{C}$ yang dimana pemanasan lebih dirasakan pada daerah daratan ketimbang lautan. Dari abad ke-19 hingga abad ke-20 tengah terjadi kenaikan muka laut sebesar 0,17 meter. Kenaikan sebanyak ini terlihat kecil, namun bagi negara kepulauan kecil seperti Kiribati, hal ini berarti 30 tahun kedepan Kiribati akan dinyatakan tidak layak untuk dihuni lagi, dan bahkan bertambah buruk dalam 50-60 tahun negara ini akan tenggelam sepenuhnya (UNFCCC, 2015).

Kiribati merupakan salah satu negara kepulauan kecil berdataran rendah yang terletak lepas Samudera Pasifik, dimana titik tertinggi datarannya tidak lebih dari tiga meter diatas permukaan air laut. Luas wilayah keseluruhan Kiribati sekitar 5 juta km^2 dengan luas wilayah daratan hanya 811 km^2 , sehingga Kiribati memiliki wilayah laut yang sangat luas dan memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 3,5 juta km^2 . Wilayah Kiribati terdiri dari 33 pulau berdataran rendah yang mana 21 pulauya berpenghuni sementara sisanya tidak berpenghuni dikarenakan terbatasnya ketersediaan air bersih (ADB, 2009).

Kiribati terancam tinggal nama. Negara kepulauan di Samudera Pasifik itu akan jadi pertama yang tenggelam akibat naiknya permukaan air laut yang dipicu perubahan iklim. Jika laju kenaikan permukaan air laut terus meningkat, maka Kiribati harus memindahkan seluruh warganya ketempat yang lebih tinggi sebelum tenggelam. Namun, sulit bagi pemerintah Kiribati untuk memindahkan seluruh penduduknya, mengingat Kiribati tidak mempunyai dataran yang cukup tinggi untuk menghindari air laut. Maka dari itu relokasi penduduk Kiribati harus dilakukan ke negara lain yang lebih tinggi (Elin, 2018).

Dampak dari perubahan iklim terhadap masyarakat global telah menjadi perhatian para pembuat kebijakan publik yang lebih luas seiring meningkatkan jumlah migran akibat perubahan lingkungan. Kenaikan permukaan air laut seperti halnya bencana alam menimbulkan tantangan dalam hal pengaruhnya terhadap pembangunan dan penghidupan, pilihan penyelesaian, produksi pangan dan kesehatan.

Menghadapi hal tersebut pemerintah Australia dan Kiribati mengambil kebijakan yang disebut dengan *Migration with Dignity* atau Migrasi yang bermartabat. Kebijakan *Migration with Dignity* adalah kebijakan yang bertujuan untuk mempersiapkan warga Kiribati menghadapi kemungkinan migrasi ke negara lain akibat kenaikan permukaan air laut. Untuk itulah kemudian Australia memiliki komitmen tinggi untuk membantu berbagai negara di dunia yang juga mengalami permasalahan serupa, salah satunya membantu Kiribati dalam menghadapi tantangan perubahan iklim (Lagan, 2008).

Berbagai program kemudian diusung oleh pemerintah Australia untuk mendukung hal tersebut, meliputi pembangunan infrastruktur dan fasilitas tangguh di bawah Program Perbaikan Pendidikan Kiribati, Proyek Perbaikan Jalan Kiribati dan meningkatkan ketahanan pesisir dengan membangun perlindungan garis pantai di lokasi-lokasi prioritas di Tarawa Selatan di bawah Proyek Adaptasi Kiribati (PAK).

Australia juga memberikan Program Keterampilan Kiribati untuk Ketenagakerjaan berinvestasi dalam ketahanan jangka panjang i-Kiribati muda dengan menyediakan pengembangan keterampilan dan akses ke pasar tenaga kerja internasional. Mencakup komitmen untuk membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dengan mendukung Pemerintah Kiribati untuk mengatasi tantangan keberlangsungan ekosistem. Hal ini merupakan sebuah langkah menarik yang bisa diikuti oleh negara

ekonomi dan pembangunan yang mendesak, infrastruktur dan fasilitas tangguh, penyediaan layanan, keterampilan dan mobilitas tenaga kerja, dan melalui dukungan untuk program perubahan iklim unggulan nasional. Sektor-sektor ini akan tetap menjadi bidang utama untuk mengintegrasikan perubahan iklim ke dalam bantuan Australia di masa depan.

KERANGKA TEORI

Untuk menjawab Rumusan Masalah diatas, maka penulis menggunakan:

Konsep Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional biasa di kenal dengan “*Nasional Interest*” yang menurut Hans. J Morgenthau sebagai kepentingan nasional merupakan dasar utama untuk mendukung politik luar negeri dan politik internasional suatu negara. Kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu Negara atas Negara lain (Mas’oed, 1990). Hubungan kekerasan atau pengendalian bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan dan kerjasama. Sedangkan menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional adalah tujuan mendasar serta faktor yang menentukan para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri.

Selain itu, adapun menurut ilmuwan lainnya seperti Padelford dan Lincoln yang memiliki pandangan tersendiri, yang menyebutkan bahwa ada 4 kategori penting dari kepentingan nasional(Suryadi, 1999), antara lain:

1. Kepentingan keamanan nasional

Yaitu Mengacu pada situasi dan keadaan dimana unsur-unsur pokok yang membentuk suatu negara seperti kedaulatan, wilayah, penduduk/ warga negara, basis ekonomi, pemerintah, sistem konstitusi dan nilai-nilai hakiki yang dianut terjamin eksistensi dan fungsinya, tanpa gangguan pihak manapun. Dalam hal ini, sumber gangguan terhadap keamanan bisa berasal dari dalam (domestik/ internal/ nasional) maupun luar (eksternal/ internasional) suatu negara.

2. Kepentingan pengembangan ekonomi

Yaitu kepentingan untuk meningkatkan ekonomi negaranya dengan menumbuhkan relasi atau kerjasama dengan negara lain.

3. Peningkatan kekuatan nasional

Yaitu Kemampuan untuk memformulasikan kebijakan domestik dan luar negeri berdasarkan pada prioritas pemerintah sendiri dan segala resikonya, serta kemampuan untuk menahan tekanan, pengaruh dan ancaman dari negara lain.

4. Kepentingan prestise

Yaitu Kepentingan untuk mendapatkan pengakuan, hal ini dapat dikarenakan oleh status, pencapaian, ataupun haknya dimana poin terakhir biasanya dirujuk untuk memahami makna pengakuan dari segi filosofis dan politis.

PEMBAHASAN

AUSTRALIA, KEBIJAKAN LINGKUNGAN DAN HUBUNGAN DENGAN KIRIBATI

Jumlah populasi di Australia hanya 0,3% dari total luas wilayahnya. Hal itu membuktikan bahwa Australia memiliki banyak ruang dan sumber daya alam yang cukup. Namun faktanya, dua per tiga dari negara ini kering atau setengah kering dan hanya sebagian yang dapat dihuni

karena kurangnya air secara permanen. Selain itu, iklim dan curah hujan tahunan Australia sangat bervariasi dan hanya 6% tanahnya yang digolongkan sebagai tanah subur. Sehingga, Australia disimpulkan sebagai benua yang paling kering di dunia, akibatnya air menjadi komoditas paling berharga di Australia (Cousins, 2005).

Kemudian, sumber pendapatan Australia sebagian besar diambil alih oleh pertanian dan pertambangan yang notabene merupakan hasil dari sumber daya alam. Sehingga, kaitan antara kegiatan ekonomi dan lingkungan di Australia tidak bisa dipisahkan dan selalu berkaitan. Produk olahan tersebut menjadi komoditas ekspor terbesar Australia kepada negara-negara Asia Pasifik. Menurut data yang dilansir dari WWF Australia, beberapa masalah lingkungan di Australia yang masih terjadi adalah sebagai berikut:

1. Deforestasi

Deforestasi dapat menyebabkan peningkatan salinitas tanah yang dapat mempengaruhi kualitas air hilir atau lereng bawah. Diperkirakan sekitar 7% area pertanian di Australia Barat mengalami masalah ini setelah deforestasi. Selain itu, penelitian di daerah tropis basah Australia menunjukkan bahwa tanah memiliki kapasitas terbatas untuk pulih dari deforestasi. Sehingga, dibutuhkan biaya tambahan untuk memperbaiki lahan yang sudah terkontaminasi akibat deforestasi. *Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation* (CSIRO) Australia memperkirakan bahwa degradasi lahan menelan biaya sekitar satu miliar dolar per tahun.

2. Pembukaan Lahan Pertanian dan Penggembalaan yang Berlebihan

Pembukaan lahan pertanian telah menyebabkan penhapusan sekitar 13% vegetasi asli Australia sejak di bawah administrasi Eropa. Sementara itu, penggembalaan juga menjadi ancaman terbesar dikarenakan mengurangi luas lahan padang rumput asli. Dalam ekosistem beriklim sedang, padang rumput asli yang tersedia kurang dari 2%. Selain itu, penggembalaan yang berlebihan mendorong penggurunan dan erosi, dan juga dilihat sebagai salah satu penyebab penyebaran tanaman invasif.

3. Polusi

Pertanian intensif mempengaruhi pantai dan lautan Australia, khususnya muara dan lingkungan di dekat pantai. Diprediksi setiap tahun hampir 19.000 ton fosfor dan 141.000 ton nitrogen dibuang ke sungai yang mengalir ke pantai.

4. Pembangunan Infrastruktur

Perhatian selanjutnya tertuju pada pertumbuhan populasi yang terus berkembang di sepanjang garis pantai. Hal itu menyebabkan pembangunan pusat-pusat metropolitan besar-besaran dengan peningkatan kepadatan penduduk di pantai Australia yang dapat menggusur keanekaragaman hayati yang sangat berharga dan lahan pertanian “bernilai tinggi”.

Sejak meraih kemerdekaannya pada 12 Juli 1979, Australia dan Kiribati telah memiliki hubungan dekat berdasarkan kerja sama regional dan internasional, di berbagai bidang, mulai dari hubungan perdagangan, program bantuan pembangunan yang substansial, dukungan untuk pengawasan maritim dan kerja sama keamanan yang lebih luas, dan kontak orang dengan orang (Department of Foreign Affairs and Trade).

Pada dasarnya, hubungan kedua negara terus berkembang akibat terdapatnya banyak faktor yang dapat meningkatkan hubungan kedua negara, antara lain:

1) Faktor Budaya Erosentrisme Inggris

Erosentrisme adalah pandangan yang condong terhadap peradaban Barat. Cakupan istilah ini bervariasi mulai dari seluruh dunia Barat, Eropa saja, atau bahkan Eropa Barat era Perang Dingin (Hobson, 2012). Bila dikaitkan dengan sejarah, istilah ini menandakan sikap apologetik terhadap kolonialisme Eropa dan bentuk-bentuk imperialisme lain (Wasserstrom, 2001).

2) Faktor Geografis

Secara geografis Australia dan Kiribati sangat berdekatan. Ini menyebabkan kedua negara memiliki kedekatan bilateral yang cukup besar. Selain itu, kedua negara memiliki permasalahan geografis yang sama sejak masa lalu hingga sekarang, yakni masalah lingkungan alam. Pada dasarnya, hampir seluruh negara yang berada di kawasan Oceania/ Pasifik Selatan adalah negara yang kering. Di masa lampau, para penduduk Kiribati bahkan mayoritas bekerja sebagai nelayan, akibat kekeringan yang mereka alami di wilayah darat.

3) Faktor Kesamaan Tujuan Negara

Australia dan Kiribati pada dasarnya memiliki kesamaan tujuan dalam pembangunan negara seperti yang telah diamanatkan dalam konstitusi masing-masing negara. Kedua negara, memfokuskan diri dalam pengembangan negara yang aman secara strategis,

stabil secara ekonomi dan berdaulat secara politik. Namun, pada dasarnya karena memiliki penduduk, tingkat ekonomi, serta angkatan bersenjata terbesar di kawasan ini, Australia lebih dianggap sebagai pihak pendonor oleh banyak negara Pasifik Selatan, termasuk Kiribati (Indo Pacific Defense Forum, 2008).

Untuk mendukung kesamaan tujuan negara ini, akhirnya Australia meluncurkan berbagai program kerjasama mulai dari pertahanan, sampai program perahu patroli pasifik. Program-program ini adalah contoh dari kontribusi jangka panjang Australia kepada Kiribati dan negara Pasifik Selatan lain.

PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MIGRATION WITH DIGNITY OLEH KIRIBATI

Pada bulan Juni 2008, Presiden Kiribati Anote Tong, menyatakan bahwa negaranya telah mencapai “*point of no return*” dan menghadapi ancaman kehilangan wilayah kedaulatan akibat kenaikan permukaan air laut. Sejak itu, pemerintah Kiribati telah mengajukan permintaan kepada masyarakat internasional, dan khususnya Australia dan Selandia Baru, untuk menerima warga dari pulau-pulau Kiribati sebagai pengungsi permanen. Pemerintah Kiribati berusaha keras melawan ancaman dari perubahan iklim yang hanya memberikan pilihan untuk tenggelam atau beradaptasi. Anote Tong, telah mengeksplorasi berbagai tindakan untuk melawan dan menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim. Presiden Tong telah mendorong negara-negara tetangga untuk membuka pintu bagi I-Kiribati yang harus meninggalkan tempat tinggalnya (Ni, 2015). Migrasi manusia disebabkan oleh kombinasi dari berbagai faktor oleh karena itu perubahan iklim tidak bisa dijadikan sebagai satusatunya faktor pendorong untuk melakukan migrasi. Akibatnya, tidak ada definisi resmi yang diberikan kepada seseorang atau orang-orang yang telah dipindahkan karena perubahan iklim dan tidak ada negara yang secara resmi mengakui status “*climate change refugee*” seperti kasus yang pernah ditemukan yaitu penolakan seorang I-Kiribati dari Selandia Baru karena status “*climate change refugee*”.

Vulnerability sebagai hasil dari *sea level rise* di Kiribati membuat migrasi menjadi jalan keluar. Dengan strategi *Migration with Dignity* diharapkan migrasi yang mungkin terjadi dalam skala besar di kemudian hari dapat meminimalisir adanya fragmentasi dalam I-Kiribati, disintegrasi sosial dan hilangnya budaya Kiribati (O'Brien & Lara, 2013). Presiden Anote Tong berharap agar rakyatnya dapat menghindar dari istilah menjadi “*refugee*” dan dapat mempertahankan harga diri dan martabat mereka sebagai anggota dari masyarakat Kiribati.

Dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-67 bulan September 2012 di New York, Amerika Serikat, Presiden Anote Tong untuk pertama kalinya memperkenalkan kebijakan *Migration with Dignity* (Faisal, 2016). Kebijakan ini dirancang untuk menyediakan perpindahan I-Kiribati secara legal mencari pekerjaan di negara lain seperti Australia dan Selandia Baru (Walsh, 2017). Program *migration with dignity* terdiri dari pelatihan bahasa Inggris dan pelatihan keterampilan agar dapat siap untuk migrasi ke luar negeri.

Australia membantu Kiribati dalam program *migration with dignity* melalui pendidikan, seperti peningkatan fasilitas pendidikan, penguatan kualitas tenaga pengajar, dan KANI (*Kiribati Australia Nursing Initiative*). Program tersebut termasuk dalam skema bantuan yang didukung oleh AusAID (*The Australian Agency for International Development*). Program-program tersebut akan terintegrasi dengan *Kiribati-Australia Partnership for Development*.

KANI adalah program pertama untuk *migration with dignity* yang didukung oleh Australia. Program ini dilaksanakan pada bulan Maret 2006 sampai Juni 2014 dengan tujuan menyiapkan warga Kiribati untuk ancaman migrasi akibat kenaikan permukaan air laut. Skema program ini adalah memberikan beasiswa kepada I-Kiribati untuk bersekolah keperawatan di Australia (Walsh, 2017).

Total dana yang dihabiskan Australia dalam program KANI adalah sebesar 20,8 juta dolar Australia. Namun, dana yang besar tersebut berkontribusi besar dalam menurunkan angka pengangguran Kiribati. Setiap tahun, angka pengangguran Kiribati turun sebanyak 1,5%. Turunnya angka pengangguran berarti semakin banyak I-Kiribati yang mendapatkan pekerjaan di Australia. Sehingga mereka dapat mengirimkan remitansi ke Kiribati dan mengurangi kemiskinan di negara tersebut.

KANI memiliki tiga tipe bantuan, yakni; 1) Beasiswa sekolah perawat selama empat tahun di Australia; 2) Beasiswa untuk pelatihan standar perawat profesional Australia untuk perawat Kiribati; 3) Peningkatan fasilitas dan kualitas pendidikan perawat di Kiribati. KANI sudah menerima sebanyak 30 warga Kiribati setiap tahun sejak tahun 2007. Pada tahun 2011, total 84 warga Kiribati telah bersekolah di Australia. Setelah I-Kiribati menyelesaikan masa studinya, mereka akan disalurkan ke Rumah Sakit yang membutuhkan agar dapat mengajukan izin tinggal tetap atau *permanent resident* (Santi, Dharmiasih, & Dewi, 2015).

Dengan ini Kiribati menjadi satu-satunya negara yang menggunakan konsep *Migration With Dignity* sebagai kebijakan migrasi tenaga kerja nasional (Government of Kiribati, 2015).

Agar Kiribati dapat mempersiapkan diri secara mental dan fisik untuk mengatasi masalah iklim dalam waktu dekat, penting untuk memastikan sumber daya manusianya memenuhi syarat secara internasional untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Tong, "Kita bisa menunggu saat kita harus memindahkan masyarakat secara massal atau kita bisa mempersiapkannya mulai dari sekarang" (Lagan, 2008). Menurutnya bermigrasi bermartabat tidak seperti merelokasi I-Kiribati dari desa-desa dan menempatkan mereka di salah satu tempat di Australia, sebaliknya strategi ini berusaha mengusulkan migrasi yang terencana, secara bertahap berdasarkan konsep 'merit & dignity' yang dapat dilaksanakan dengan adanya pengembangan program pelatihan yang menyediakan kesempatan bekerja di luar negeri, khususnya Australia dan Selandia Baru (O'Brien & Lara, 2013). Melalui strategi relokasi, pemerintah berusaha menciptakan peluang migrasi yang lebih baik dengan mengamankan opsi migrasi tenaga kerja melalui upskilling terutama pada generasi muda (Maclellan, 2011).

Kebijakan Migration with Dignity ini didasarkan pada adanya akuisisi keterampilan baru bagi I-Kiribati sehingga diharapkan mereka akan dapat memasuki pasar tenaga kerja internasional yang kompetitif dan menjadi layak untuk kategori visa tertentu sebagai modal ke negara-negara yang berpotensi menerima mereka sebagai tenaga kerja asing (Faisal, 2016). Karena menempati tingkat pengangguran yang tinggi dan merupakan jumlah yang besar dalam populasi Kiribati, anak muda menjadi sasaran strategi adaptasi ini (Phelps). Fokus dalam strategi ini adalah pada pembelajaran bahasa, ketrampilan penduduk dan perbaikan sistem pendidikan agar dapat masuk dalam pasar kerja internasional. Sehingga kebijakan ini dapat membantu proses perpindahan penduduk Kiribati secara sukarela dan dalam jangka panjang tanpa menggunakan status pengungsi.

Kepadatan penduduk di Tawara menjadi penyebab masalah ketersediaan pasokan air. Ancaman kekeringan dan salinasi akan menghabiskan pasokan air di wilayah tersebut. Sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran yang berujung pada kelangkaan sumber daya air di Tawara. Akibat ruang dan sumber daya yang terbatas, Survei Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga pada tahun 2006 memperkirakan bahwa hampir 22% penduduk Kiribati hidup dalam kemiskinan. Beralih pada isu ekonomi, sumber utama pendapatan Kiribati hanya berasal dari remitansi, pembayaran lisensi penangkapan ikan, ekspor produk laut dan kopra, dan *National Trust Fund*. Remitansi menyumbang sekitar 11 juta dolar setiap tahun ke ekonomi Kiribati, sementara yang lainnya tidak berpengaruh signifikan.

Masalah kerentanan ekonomi ini juga dipicu oleh sumber daya manusia yang kurang berkualitas sehingga tidak terjadi penyerapan tenaga kerja yang memadai. Selain itu, pemerintah juga tidak dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup sehingga perlu mengirimkan I-Kiribati untuk bekerja di luar negeri. Berdasarkan data dari ADB, sebanyak 40.000 orang yang mencari pekerjaan, hanya 30% yang mendapatkan pekerjaan. Data tersebut diperkuat dengan laporan dari *2014 Poverty Assessment* yang menyatakan bahwa sekitar 2.000 pemuda Kiribati memasuki angkatan kerja setiap tahun di Kiribati dan lapangan yang tersedia tidak cukup untuk menampung permintaan kerja. Pada tahun 2010, total tingkat pengangguran di Kiribati mencapai 31%.

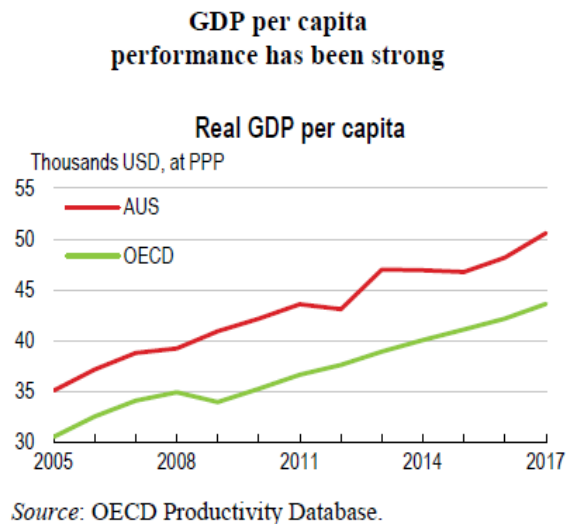
Pada tahun 2011, pemerintah meluncurkan program peningkatan kapabilitas pemuda melalui *Kiribati Institute of Technology for Technical and Vocational Education and Training*. Pelatihan difokuskan pada pertukangan, pemipaan, perawatan, akuntansi, dan kemampuan lain yang diperlukan. Lebih dari setengah karyawan muda keluar dari pekerjaan dan banyak yang bermigrasi ke Tarawa Selatan, ibukota Kiribati. Mereka menganggap di ibukota lebih mudah untuk mencari pekerjaan dibandingkan provinsi lain. Sementara sebagian lainnya memilih menjadi pelaut atau mencari pekerjaan musiman sebagai pemetik buah di Australia atau Selandia Baru .

KEPENTINGAN AUSTRALIA DALAM PROGRAM *MIGRATION WITH DIGNITY*

Australia memiliki kerangka kebijakan luar negeri yang tertuang dalam *White Paper*. Kerangka kebijakan tersebut menjadi tolak ukur kegiatan luar negeri yang harus dilakukan oleh Australia, termasuk memberi bantuan, mengatasi masalah regional, dan berkontribusi pada pembangunan global. Namun, *White Paper* ini sering disimpulkan lain oleh negara lain. Di samping kontribusi Australia, *White Paper* dianggap dijadikan alat untuk menunjang eksistensinya sebagai pemimpin di kawasan. Dalam kasus Kiribati, *White Paper* juga menjadi topik menarik untuk diulas lebih dalam.

Dalam *White Paper* tahun 2006, Australia mengeluarkan banyak program bantuan ke Asia dan Pasifik. Komunitas global meminta Australia untuk memainkan peran penting sebagai pendonor pada isu-isu pembangunan tertentu di Asia dan Pasifik (Downer, 2006). Australia dan Selandia Baru akan bekerja lebih erat memberikan bantuan dana ke Pasifik. Kedua negara menyediakan sekitar \$1 miliar bantuan pembangunan untuk kawasan ini (Department of Foreign Affairs and Trade, 2008).

Berikut ini adalah bukti data kenaikan GDP per kapita Australia.



Selain karena GDP, menurut data PBB, Australia memiliki emisi karbon dioksida per kapita tertinggi kedua di antara negara-negara *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Sehingga, Australia berkontribusi terhadap penyebab perubahan iklim. Australia dan Selandia Baru memiliki tanggung jawab untuk menyebabkan perubahan iklim. Hal ini menimbulkan stigma bahwa Australia sudah memiliki kewajiban untuk membantu negara-negara Pasifik yang notabene penghasil karbon rendah (Wyett, 2013).

Selain ekspor, survei sosio-ekonomi 2006 mengungkapkan bahwa penambangan pantai adalah sumber pendapatan penting bagi para pekerja di Tarawa Selatan. Sekitar 120 rumah tangga bergantung secara finansial dalam pertambangan ini. Oleh karena sangat membutuhkan uang tunai, penambangan dilakukan di tepi pantai dan juga di tanah itu sendiri, seperti yang terlihat dalam jumlah lubang pinjaman yang terlihat di daerah tersebut. Para penambang ini percaya bahwa mereka bertindak sesuai dengan hak mereka sebagai pemilik tanah adat (Julie Babinard, Hatzios, Faiz, & Somali, 2014).

Dukungan Australia kepada Kiribati untuk mengimplementasikan Rencana Reformasi Ekonomi mereka membantu Kiribati untuk memaksimalkan manfaat yang mengalir dari sumber daya alamnya serta membantu membangun ketahanan ekonomi yang lebih besar terhadap guncangan eksternal. Dukungan Australia difokuskan pada kegiatan yang memperkuat:

- manajemen keuangan publik melalui transparansi yang lebih besar dalam mengelola pendapatan perikanan, tata kelola yang lebih baik dari dana perwalian dan pelaporan dan pemantauan utang publik dan kewajiban kontinjensi yang lebih baik
- untuk menciptakan lingkungan untuk sektor yang inklusif dan sektor swasta memimpin pertumbuhan, melalui perluasan cakupan layanan publik yang penting (listrik, air, saluran pembuangan dan telekomunikasi) serta mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas (Department of Foreign Affairs and Trade, t.thn.).

Bantuan kelonggaran ekspor dan pengelolaan sumber daya alam oleh Australia lambat laun akan menciptakan dependensi ekonomi Kiribati kepada Australia. Terlebih lagi, Kiribati telah menggunakan mata uang dolar Australia, tentu merupakan nilai tukar yang cukup tinggi. Namun disisi lain, hal tersebut membawa keuntungan bagi Australia yang hendak melakukan ekspor-impor kepada Kiribati karena tidak perlu perhitungan menggunakan mata uang dolar internasional. Selain itu, Australia juga memiliki keuntungan sebagai investasi terbesar pengelolaan sumber daya alam Kiribati yang semakin memperkuat integrasi ekonomi kedua negara.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Australia memilih untuk memberikan program pelatihan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia I-Kiribati agar berstatus migrasi yang bekerja di luar negeri bukan sebagai pengungsi. Kemudian, uang yang mereka hasilkan dari Australia dapat dikirim ke rumah untuk menghidupi keluarga mereka dan meningkatkan remitansi negara. Remitansi tersebut dapat digunakan negara untuk membeli pulau. Disisi lain, Australia pun memiliki keuntungan yang positif untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya terutama dibidang kesehatan. Untuk itu, Australia membiayai program KANI.

Selain itu, Australia juga membantu Kiribati dalam proses pembelian 6.000 hektar tanah di Fiji, ini tak lain adalah untuk menghindari krisis kemanusiaan di Australia dan khususnya di Kiribati yang terjadi akibat kenaikan permukaan air laut. akan digunakan sebagai lahan pertanian untuk ketahanan pangan dan merelokasi penduduknya jika memang dibutuhkan (Dizard, 2014). Bantuan seperti ini sudah tidak asing lagi bagi Australia terhadap Kiribati, mengingat pada tahun 1940 pulau Banaba di Kiribati hancur akibat pertambangan fosfat yang mengakibatkan sebagian besar penduduknya sehingga Australia membantu Kiribati ketika melakukan pembelian dan perpindahan ke pulau Rabi di Fiji (Loughry & McAdam, 2008). Dilanjutkan pada tahun 1990-an pemerintah Kiribati merelokasi hampir 5000 orang dari Tarawa ke pulau-pulau kecil. Populasi Jumlah penduduk Tarawa Selatan telah meningkat lebih dari 50 ribu orang hanya dalam kurun waktu 60 tahun. Sehingga mobilitas migrasi antar pulau telah menjadi strategi kunci adaptasi tradisional yang sudah dilakukan sejak dulu. (Crowter, 2010).

KESIMPULAN

Australia yang merupakan negara yang unik dengan berbagai keanekaragaman hayati. Memiliki 14 wilayah yang masuk dalam situs warisan membuat Australia menjadi negara yang sangat bagus untuk di kunjungi. Salah satunya taman laut *Great Barrier Reef* di *Queensland*. Banyaknya keanekaragaman hayati yang di jaga sangat indah di Australia tak heran bagi negara ini untuk andil dalam kegiatan tentang melestarikan lingkungan hidup. Yang terbaru ini Australia menjalankan program *Migration with Dignity* dengan Kiribati. Yang mana hubungan Australia dan Kiribati telah terjalin cukup lama, diantaranya dalam perdagangan, program bantuan pembangunan yang substansial, dukungan untuk pengawasan maritim dan kerja sama keamanan yang lebih luas, dan kontak orang dengan orang. Kedua negara secara tidak langsung sebenarnya juga memiliki tujuan yang serupa, yakni memfokuskan diri dalam pengembangan negara yang aman secara strategis, stabil secara ekonomi dan berdaulat secara politik, serta faktor Kiribati yang memang merupakan negara kecil banyak menjadi alasan hubungan keduanya berjalan secara saling menguntungkan, termasuk salah satunya melalui program *Migration with Dignity*.

Kebijakan *Migration with Dignity* ini didasarkan pada adanya akuisisi keterampilan baru bagi I-Kiribati sehingga diharapkan mereka akan dapat memasuki pasar tenaga kerja internasional yang kompetitif dan menjadi layak untuk kategori visa tertentu sebagai modal ke negara-negara yang berpotensi menerima mereka sebagai tenaga kerja asing. Karena menempati tingkat pengangguran yang tinggi dan merupakan jumlah yang besar dalam populasi Kiribati, anak muda menjadi sasaran strategi adaptasi ini. Fokus dalam strategi ini adalah pada pembelajaran bahasa, keterampilan penduduk dan perbaikan sistem pendidikan agar dapat masuk dalam pasar kerja internasional. Sehingga kebijakan ini dapat membantu proses perpindahan penduduk Kiribati secara sukarela dan dalam jangka panjang tanpa menggunakan status pengungsi. Salah satu bentuk sumbangsih Australia yang dapat dikategorikan sebagai negara pendonor terbesar di Pasifik Selatan, terutama apabila kita melihat bagaimana peningkatan GDP yang dimiliki oleh Australia sejak 2005-2015.

Selain itu, Australia juga memiliki kepentingan ekonomi atas Kiribati. Dukungan Australia kepada Kiribati untuk mengimplementasikan Rencana Reformasi Ekonomi mereka membantu Kiribati untuk memaksimalkan manfaat yang mengalir dari sumber daya alamnya serta membantu membangun ketahanan ekonomi yang lebih besar terhadap guncangan eksternal. Bantuan kelonggaran ekspor dan pengelolaan sumber daya alam oleh Australia lambat laun akan menciptakan dependensi ekonomi Kiribati kepada Australia. Terlebih lagi, Kiribati telah menggunakan mata uang dolar Australia, tentu merupakan nilai tukar yang

cukup tinggi. Namun disisi lain, hal tersebut membawa keuntungan bagi Australia yang hendak melakukan ekspor-impor kepada Kiribati karena tidak perlu perhitungan menggunakan mata uang dolar internasional. Selain itu, Australia juga memiliki keuntungan sebagai investasi terbesar pengelolaan sumber daya alam Kiribati yang semakin memperkuat integrasi ekonomi kedua negara serta kepentingan Australia adalah untuk menjaga stabilitas dalam negeri dari berbagai ancaman yang kemungkinan muncul atas migrasi warga Kiribati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Authority, E. P. (2013). *State of the Environment of South Australia*. (Adelaide: Environment Protection Authority).
- Carlton, C. (2000). *Pengantar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). hlm. 501-505.
- Cousins, S. (2005). *Contemporary Australia: Environmental Issues*. (Melbourne: Monash University).
- Hobson, J. (2012). *The Eurocentric conception of world politics : western international theory*. (New York: Cambridge University).
- Mas' oed, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. (Jakarta: LP3ES), hlm 163.
- Plano, J; Olton, R. (1982). *The International Dictionary*, Third Edition. (London: Clio Press Ltd. England), hlm. 7.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta). hlm 11.
- Suryadi, B. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. (Jakarta: Jayabaya University Press). hlm 32.
- Syamsuddin, H. (1989). *Jurnal Politik*. (Jakarta: PT Gramedia).
- Warsito, T. (1998). *Teori-Teori Politik Luar Negeri, Relevansi dan Keterbatasannya*. (Yogyakarta: Bigraf Publishing). hlm 29.

Jurnal

- Barden, K. E. (2011). *Land's End: Can an Island Nation Survive Without Its Islands?* World Policy Journal, Vol. 28. hlm. 49-55.
- Faisal, M. D. (2016). *Kebijakan Migration With Dignity Sebagai Solusi Prioritas Kiribati dalam Merespon ancaman Sea Level Rise*. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 5. hlm268-277.
- Julie Babinard, C. R., Hatzios, M. E., Faiz, A., & Somali, A. (2014). *Sustainably Managing Natural Resources and the Need for Construction Materials in Pacific Island Countries: The Example of South Tarawa, Kiribati*. Natural Resources Forum, Vol. 38, No. 31. hlm 1-20.
- Locke, J. T. (2009). *Climate Change-Induced Migration in the Pacific Region: Sudden Crisis and Long-Term Developments*. The Geographical Journal, Vol. 175, No. 3. hlm 171-180.
- Ni, Xing-Yin. (2015). *A Nation Going Under: Legal Protection for "Climate Change Refugees."* 88 Journal of Boston College International & Comparative Law Review.
- Nuechterlein, D. (1989). *National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making*. British Journal of International Studies. Vol. 2. No. 3. (Cambridge: University Press). hlm 241.
- Santi, N. M., Dharmiasih, D. W., & Dewi, P. R. (2015). *Program Kiribati Australia Nursing Initiative dalam Mendukung Kebijakan Migration with Dignity Pemerintah Kiribati 2006-2014*. Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 1, No. 3. hlm 1-9.
- Smith, R. (2013). *Should they stay or should they go? A discourse analysis of factors influencing relocation decisions among the outer islands of Tuvalu and Kiribati*. Journal of New Zealand & Pacific Studies.
- Wyett, K. (2013). *Escaping a Rising Tide: Sea Level Rise and Migration in Kiribati*. Asia and the Pacific Policy Studies, Vol. 1, Issue 1. hlm171-185.

Laporan Resmi

- ADB. (2009). *Kiribati Social and Economic Report 2008: Managing Development Risk*. Asian Development Bank, Department of External Relations. (Manila: Asia Development Bank Publication in Pacific Studies Series).
- Asian Development Bank. (2011). *Climate Resilience and Sustainable Urban Development in Pacific Developing Member Countries*. (Manila: ADB)
- Beca International Consultants Ltd (Beca). (2010). *Shoreline protection guidelines*. Report prepared for Government of Kiribati
- Department of Foreign Affairs and Trade. (t.thn.). *Kiribati Country Brief*. Diakses melalui Department of Foreign Affairs and Trade: <https://dfat.gov.au/geo/kiribati/pages/kiribati-country-brief.aspx>
- Department of Foreign Affairs and Trade. (n.d.). *Kiribati country brief*. Diakses melalui Department of Foreign Affairs and Trade: <https://dfat.gov.au/geo/kiribati/Pages/kiribati-country-brief.aspx>
- Department of Foreign Affairs and Trade. (t.thn.). *Kiribati–Australia Partnership for Development*. Diakses melalui Department of Foreign Affairs and Trade : <https://dfat.gov.au/geo/pacific/development-assistance/partnerships/Pages/kiribati.aspx>
- Department of Foreign Affairs and Trade. (t.thn.). *Implementing Economic Reforms in Kiribati*. Diakses melalui Department of Foreign Affairs and Trade: <https://dfat.gov.au/geo/kiribati/development-assistance/Pages/kiribati-objective-1-implementing-economic-reforms.aspx>
- Department of Foreign Affairs and Trade. (t.thn.). *Port Moresby Declaration*. Diakses melalui Department of Foreign Affairs and Trade: <https://dfat.gov.au/geo/pacific/development-assistance/partnerships/Pages/port-moresby-declaration.aspx>
- Downer, T. H. (2006). *Launch of the Australian Aid White Paper*. Canberra: Australian Institute of International Affairs.
- Economy Watch. (2017, Maret 17). *Kiribati Trade Statistics, Export Statistics, Export Partners and Products, Import Statistics, Import Partners and Products*. Diakses melalui Economy Watch: http://www.economywatch.com/economic-statistics/Kiribati/Trade_Statistics/
- Government of Kiribati. (2015). *Kiribati National Labor Migration Policy*. (Tarawa: Minister of Labour and Human Resource Development).
- Haidi. (2016). *Background Information Perkembangan Terkini Hubungan Bilateral Wilayah Pasifik Selatan*. Dokumen Kementerian Luar Negeri.
- International Monetary Fund [IMF]. (2015). *Kiribati: 2015 Article IV Consultation- Press release and Staff Report*. Washington, D.C. USA
- Loughry, Maryanne dan McAdam, Jane, (2008). *Kiribati – relocation and adaptation*, dalam Couldrey, Marion & Herson, Maurice (ed.), 2008. *Forced Migration Review: Climate change and displacement*. (Manila: Refugee Studi Centre).
- Oakes, R., Milan, A., & Campbell, J. (2016). *Kiribati: Climate change and migration, Relationships between household vulnerability, human mobility and climate change*. Report No. 20
- OECD. (1998). *Environmental performance Reviews: Australia Conclusions and Recommendations*. Canberra: OECD.
- OECD. (2018, Desember). *Economic Survey of Australia 2018*. Diakses melalui OECD: <https://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-australia.htm>
- Parliament of Australia. (2017). *Australian Parliamentary Delegation to Kiribati and the Kingdom of Tonga*. Canberra: Parliament of Australia.
- Trade, D. o. (2014). *Environment Protection Policy for the Aid Program*. Canberra: Department of Foreign Affairs and Trade.
- United Nations. (2008). *Ex-ante Impact Assessment of Likely Consequences of Graduation of the Republic of Kiribati from the Least Developed Country Category*. New York: United Nations.
- UNFCCC, *Sekilas tentang perubahan iklim*. Diakses melalui UNFCCC: https://unfccc.int/files/meetings/cop_13/press/application/pdf/sekilas_tentang_perubahan_iklim.pdf, pada 17 November 2018, pukul 08.12 WIB

Artikel Online

- Bräuer, H. J. (2016). *Migrant Crisis: Changing Attitudes of A German City*. Diakses melalui BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-europe-36148418>
- Crowther, Ashley. *Sea-Level Rise and Migration: Pacific Islands*. Diakses melalui Ashley Crowter: <http://www.ashleycrowther.org/sea-level-rise-and-migration-pacific-islands/>
- Department of Foreign Affairs and Trade. (2008). *Port Moresby Declaration*. Diakses melalui Department of Foreign Affairs and Trade: <https://dfat.gov.au/geo/pacific/development-assistance/partnerships/Pages/port-moresby-declaration.aspx>
- Elin, Yunita. (2018). Terancam Tenggelam, “Surga” Kiribati Jadi Atlantis Kedua. Diakses melalui LIPUTAN 6: <https://www.liputan6.com/global/read/2143624/terancam-tenggelam-surga-kiribati-jadi-atlantis-kedua>, pada 17 November 2018. Pukul 09.03 WIB
- Field, M. (2011). *Kiribati gets radical as atolls flood*. Diakses melalui Stuff: www.stuff.co.nz/world/southpacific/5584347/Kiribati-gets-radical-as-atollsflood
- Hayati, S. (2018). *Cara Australia Lindungi Lingkungan*. Diakses melalui Aceh Tribun News: <http://aceh.tribunnews.com/2018/07/19/cara-australia-lindungi-lingkungan>. pada tanggal 21 Desember 2018 pukul 11. 10 WIB.
- Indo Pacific Defense Forum. (2008). *Australia meningkatkan hubungan ekonomi dan militer dengan negara-negara tetangganya di kepulauan Pasifik*. Diakses melalui Indo Pacific Defense Forum: <http://apdf-magazine.com/id/australia-meningkatkan-hubungan-ekonomi-dan-militer-dengan-negara-negara-tetangganya-di-kepulauan-pasifik/>
- Kedutaan Besar Australia. (2015). *Gambaran sekilas tentang Australia*. Diakses melalui Kedutaan Besar Australia: https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/gambaran_sekilas.html
- O’Brien, Lara K., (2013). *Migration With Dignity: A Study of Kiribati-Australia Nursing Initiative (KANI)*. Thesis Master of University of Kansas.
- Pranoto. (2016). *Panduan Singkat Penelitian Kualitatif*. Diakses melalui BNNP Tegal: <http://www.bppp-tegal.com/web/index.php/artikel/126-panduan-singkat-penelitian-kualitatif>, pada 28 Desember 2018 pukul 21.11 WIB.
- Smith, R. 2013. Should they stay or should they go? A discourse analysis of factors influencing relocation decisions among the outer islands of Tuvalu and Kiribati. *Journal of New Zealand & Pacific Studies*.
- Trade, D. (2014). *Building a better educated and healthier population in Kiribati*. Diakses melalui Department of Foreign Affairs and Trade Australia: <https://dfat.gov.au/geo/kiribati/development-assistance/Pages/kiribati-objective-2-building-a-better-educated-and-healthier-population.aspx>. pada tanggal 21 Desember 2018 pukul 13.19 WIB.
- Walsh, K. (2017, Juli 11). *Kiribati Confronts Climate Upheaval by Preparing for ‘Migration with Dignity’*. Diakses melalui Mongabay: <https://news.mongabay.com/2017/07/kiribati-confronts-climate-upheaval-by-preparing-for-migration-with-dignity/>
- WWF. (t.thn.). *Issues with No End in Sight*. Diakses melalui WWF: http://wwf.panda.org/wwf_offices/australia/environmental_problems_in_australia/

